



**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI  
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,  
DEWAN KELAUTAN INDONESIA SERTA PERUM BULOG**

---

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Tertutup – Terbuka
Dengan	:	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Hari, Tanggal	:	Selasa, 15 Januari 2019
Waktu	:	13.00 WIB s.d. Selesai
Acara	:	1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018; 2. Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019; 3. Temuan Hasil Kunjungan Reses, dan 4. Isu-isu Penting; 5. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
Ketua Rapat	:	Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	28 dari 47 anggota
Hadir Mitra Kerja	:	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran.

**KOMISI IV DPR RI:**

1. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.
2. SUDIN
3. Drs. I MADE URIP, M.Si.
4. Ir. MINDO SIANIPAR
5. Ir. TAGORE ABUBAKAR
6. DJENDRI ALTING KENTJEM, S.H., M.H.

7. RIDWAN ANDI WITTIRI
8. ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.
9. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA
10. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
11. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.H.
12. Ir. H. EDDY KUNTADI
13. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
14. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
15. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.
16. M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.
17. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.
18. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
19. Hj. KASRIAH
20. Drs. HASANUDDIN, A.S., M.Si.
21. Drs. FADHOLI
22. SULAEMAN L. HAMZAH

**ANGGOTA YANG IJIN:**

1. Drs. H. ROEM KONO
2. Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.
3. VIVA YOGA MAULADI, M.Si.
4. DANIEL JOHAN
5. ONO SURONO, S.T.
6. Ir. EFFENDI SIANIPAR
7. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.
8. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
9. RIDWAN ANDI WITTIRI
10. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.
11. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
12. H. OO SUTISNA, S.H.
13. SUSI SYAHDONNA MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.
14. Dr. FELICITAS TALLLULEMBANG
15. Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
16. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.
17. Drs. UMAR ARSAL
18. Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H.
19. EKO HENDRO PURNOMO. S.Sos.
20. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
21. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
22. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.

23. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.
24. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY
25. Drs. MUCHTAR LUTHFI A.MUTTY, M.Si.
26. LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E.
27. Dr. ERISLAN, S.T., M.M.

## **JALANNYA RAPAT:**

### **KETUA RAPAT/F-GERINDRA (EDHY PRABOWO., M.M., M.B.A.):**

Bisa kita lanjutkan rapat kita yang tadi?

Korum saya pikir sudah kita, tadikan sebenarnya kita hanya melanjutkan dari materi yang berbeda. Saya yakin sama Pak Rumkono, Pak Rumkono sekarang sedang ada rapat Pleno Fraksi Golkar di KK 1, jadi mohon izin kita kalau bisa rapat kita jalankan, semoga waktu kita bisa efisien dan materi-materi yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bisa segera kita selesaikan.

*Bissmillahirrohmaanirrohiem*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

**Yang terhormat Anggota Komisi IV DPR RI,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya,**

**Yang terhormat Saudara Kepala Badan Retorasi Gambut beserta jajarannya,**

**Yang terhormat Saudara Direktur Utama Perum Perhutani dan PP Perhutani 1-5, serta hadirin yang kami hormati.**

Itu Dirutnya di depan saja, jauh-jauh di belakang.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Hidayahnya kita dapat mengadakan rapat dalam keadaan sehat walafiat guna menjalankan tugas dan fungsi DPR RI.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 11 Desember

2019 dan keputusan rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 8 Januari 2018 pada hari ini Selasa, 15 Januari 2019 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas evaluasi tahun anggaran 2018, rencana pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2019, temuan hasil kunjungan kerja reses, isu-isu penting dan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam RTRWP.

**Bapak Ibu yang kami hormati,**

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI telah hadir dan ditandatangani 25 Anggota dari 49 Anggota Komisi IV DPR RI dan 9 dari 10 Fraksi yang ada, sesuai dengan ketentuan 246 dan Pasal 251 Ayat I Peraturan Tata Tertib DPD RI rapat kerja ini dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA)**

**Bapak Ibu yang kami hormati,**

Sesuai undangan rapat kerja hari ini dimulai pukul 13:00, namun tadi karena ada agenda rapat sebelumnya yang baru bisa kita selesaikan, agak sedikit molor makanya kita rapat kita geser menjadi pukul 14:00 dan rencananya akan diakhir pukul 15:00. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI atau sesuai dengan kesepakatan bersama dengan acara rapat sebagai berikut;

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2018, rencana anggaran tahun anggaran 2019, temuan hasil kunjungan kerja reses, isu-isu penting dalam perubahan peruntukan kawasan hutan dalam RTRWP.
3. Tanggapan Anggota Komisi IV.
4. Jawaban atas tanggapan Anggota Komis IV.
5. Kesimpulan Rapat.
6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat kita setujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

**Bapak Ibu yang kami hormati,**

DPR RI telah menyetujui APBN tahun anggaran 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 8.60.951.000.730.000 (delapan triliun enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di dalamnya juga termasuk APBN tahun anggaran 2018 Badan Restorasi Gambut, agar saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala BRG dapat menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2018.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa DPR RI juga telah menyetujui APBN tahun anggaran 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 9.76.000.472.682.000 (sembilan triliun tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari rupiah murni pendapatan negara bukan pajak, rupiah murni pendamping, hibah luar negeri, surat berharga syariah negara, dan badan layanan umum agar saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala BRG dapat menyampaikan rencana-rencana pasaran APBN tahun anggaran 2019.

Kemudian terkait dengan hasil kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menyampaikan tindak lanjut atas temuan aspirasi dan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI pada masa sidang, masa reses yang lalu yaitu, ke Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Bali.

#### **Hadirin yang terhormat,**

Untuk masalah isu terkini yang berhubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Komisi IV DPR meminta penjelasan atas beberapa hal sebagai berikut;

1. Pelaksanaan penegakan hukum atas penemuan kayu illegal di Pelabuhan di Jawa Timur,
2. Terjadinya bencana banjir dan tanah longsor diberbagai daerah tanah air akhir-akhir ini,
3. Komis IV DPR RI meminta penjelasan atas pelaksanaan program rehabilitasi lahan kritis, mengingat lahan kritis yang tersebar dibanyak wilayah di Indonesia ditengarai merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana tersebut.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI juga meminta penjelasan kepada saudara Menteri LHK atas hal-hal sebagai berikut;

1. Tindak lanjut perubahan peraturan kawasan hutan dalam refisi RTRWP
2. Pelaksanaan program di Kementerian LHK yang berbasis kemasyarakatan

3. Tanggapan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kementerian LHK atas informasi yang telah disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dalam kesempatan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI tanggal 25-27 Oktober 2016 yang lalu, terkait pelanggaran yang telah dilakukan oleh sekitar 120 perusahaan perkebunan namun tetap dapat melakukan kegiatan operasional di atas areal seluas 800.000 hektar di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Saudari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anggota Komisi IV yang kami hormati,**

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati kami persilakan saudari Menteri dan Kepala Badan Restorasi Gambut untuk menyampaikan penjelasannya, kami persilakan.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):**

Terima kasih.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,  
Yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.**

Pertama kami mengucapkan terima kasih atas undangan rapat kerja ini dan terima kasih atas bimbingan, dan dukungan Komisi IV DPR RI kepada KLHK yang menjadikan spirit untuk kami terus memperbaiki kinerja Kementerian.

Izinkan kami melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan 2018, rencana pelaksanaan anggaran 2019, temuan hasil kungker reses, ahli fungsi lahan RTRW Provinsi dan isu-isu penting, termasuk hal-hal yang barusan disampaikan dari Bapak Ketua yang sedapat-dapatnya kami coba jelaskan dan nanti sambil kami mengumpulkan kembali materinya.

**Pak Ketua, Ibu dan Bapak yang kami hormati,**

Pada bagian pertama untuk evaluasi pelaksanaan 2018 izinkan kami melaporkan bahwa untuk tahun anggaran 2018 persituasi 10 Januari capaian Kementerian LHK dari pagu 8.6.950.000.730.000 (delapan triliun enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi mencapai 7.159.485.320.273 (tujuh triliun seratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan lima juta tiga ratus dua ribu dua ratus tujuh tiga puluh rupiah) 88,82%. Kalau dilihat komponen program ini yang

tertinggi 98% oleh program Litbang, yang 97% itu program-program Pengembangan ESDM, Penyuluhan, Inspektorat Jenderal, Pengawasan, Pengendalian Perubahan Iklim, maupun sampah dan limbah serta hutan produksi, dan 95% konserfasi, pengelolaan daerah aliran sungai dan penegakan hukum serta pencemaran dan 90% perhutanan sosial serta, Sekretariat Jenderal 92%, dan yang 85% adalah badan restorasi gambut serta planologi kehutanan dan tata lingkungan hanya 53%.

### **Bapak Ketua, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati**

Saya mohon izin dan meminta maaf ternyata terdapat kendala realisasi anggaran pada rapat kerja yang lalu kami berharap bisa diatas 95%, tetapi terdapat kendala pada rendahan penyerapan pada program kranalogi kehutanan dan tata lingkungan, karena beberapa peraturan yang selalu menjadi acuan juklak juknis untuk pekerjaan-pekerjaan penunjukan, pengukuhan maupun pengukuran itu ternyata dibutuhkan aturan-aturan teknis yang baru yang dirasakan terlambat keluarnya, sehingga penyelesaian inferentarisasi, kemudian evaluasi sampai kepada arah untuk penentuan batas baru bisa diselesai pada semester dua dan sementara itu tata batas belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan, dan direncanakan program-program ini akan diintensifkan ditahun 2019.

Sementara itu disisi yang lain yaitu, program perutahan sosial juga mengalami hambatan karena beberapa kegiatan dalam bentuk hibah luar negerinya yang direncanakan di Palu dan Donggala mengalami hambatan karena bencana. Kemudian disisi lain realisasi anggaran badan restorasi gambut juga mengalami hambatan karena proses administrasi dan revisi pada satuan-satuan kerja tugas pembantuan, berarti di daerah penetapan kelompok masyarakat dan operasional di lapangan baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus.

### **Pak Ketua dan Bapak Ibu yang kami hormati,**

Dengan demikian realisasi Kementerian LHK mencapai 88,82%. Pencapaian Hutan Sosial secara fungsional kami menyiapkan sebuah dokumen sebanyak 115 halaman dan mohon izin nanti kami snapshot saja beberapa nanti mohon periksa secara langsung, nanti dokumennya oleh yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota.

Untuk Perhutanan Sosial sampai dengan Desember 2018 cara sasaran fungsional mencapai 2.504.000 hektar bagi 586.793 KK pada halaman 7. Sementara itu untuk program reforma agrarian dari target 4,1.000.000 yang harus disiapkan oleh Kehutanan, ini sudah siapkan areal untuk reforma agrarian dari kawasan hutan seluas 2,4.000.000 hektar.

Dengan gambaran itu **Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.** Terdapat peningkatan proporsi alokasi persizinan bagi masyarakat dari semula 4% di tahun 2015 sampai dengan 2015, maka pada tahun 2018 ini sudah bisa mencapai 10,8%, kita akan terus menindak lanjuti di 2019.

Selanjutnya berkenaan dengan lahan kritis rehabilitasi hutan sebagaimana terlihat pada halaman 10 itu telah dilakukan dalam bentuk kegiatan penanaman lahan kritis, menanam mangrove, pembangunan hutan kota, kebun bibit rakyat, persemayan, penanaman bibit produktif pada tahun 2018 dilaksanakan pada 188.300 hektar dan untuk tahun 2019 ini akan kita intensifkan, kira-kira 260 sampai 230.000 hektar APBN dan 48.000 kita akan memberikan endeavors ment untuk perizinan-perizinan tambang melakukan penanaman pada DAS disekitarnya. Kemudian berkait dengan pemulihan gambut nanti Pak Kepala BRG bisa menambahkan dari yang dilakukan oleh di Rektorat Jenderal atau program di Kementerian dilakukan pemulihan dengan sekat kamal di Sumatera 399 unit, kira-kira 5000 atau 6000 hektar, pada halaman 14 untuk Kalimantan 133 sekat pada 2082 hektar. Kalau melihat ini seperti ini,

#### **Bapak Pimpinan yang kami hormati,**

Usaha-usahan untuk melakukan restorasi gambut di 2018 kelihatan, karena dia dilakukan oleh swasta juga, kemudian juga dukungan-dukungan dari filantroofik anggaran kepada masyarakat secara langsung maka, bangunan untuk kanal dan lain-lain kita lihat misalnya di halaman di 15 itu melalui kegiatannya BRG itu banyak dilakukan. Kita lihat di halaman 16 juga terdapat bangunan yang wajib dilakukan oleh para pemegang izin baik hutan alam, hutan tanaman, maupun hutan restorasi ekosistem di halaman 16. Jadi dengan kondisi itu,

#### **Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota yang kami hormati.**

Sejumlah 39 perusahaan HTI telah berusaha melakukan upaya pemulihan gambut dengan cangkupan pada luasan 1,6.7.000.000 hektar dan sejumlah 109 perusahaan perkembunan telah berusaha untuk melakukan pemulihan pada 822.900 hektar.

#### **Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota yang terhormat,**

Kami laporkan bahwa tahun 2018 jumlah titik panas sebanyak 9245 titik dibandingkan dengan 2017 yaitu 2440, kemudian areal yang terbakaranya 510.000 sampai dengan terakhir, dibandingkan dengan 165.000 pada tahun 2017, jadi memang lebih panas di 2018 dari pada 2017. Di 2019 kami sejak libur natal sudah mengamati dan mengikuti juga terjadi kebarakan hutan padahal sedang musim hujan, tadi sampai



dengan hari ini jumlah titik api terekam antara 20an 23 dibandingkan dengan 2018 pada era yang sama, pada periode yang sama kira-kira hanya 10, di 2019 ini diperkirakan akan lebih panas, oleh karena itu Kementerian secara terus menerus mengikuti perkembangannya di lapangan.

**Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota yang kami hormati,**

Selanjutnya deforestasi di Indonesia semakin bisa dikontrol, pada tahun 2016-2017 kita mengalami deforestasi total net kira-kira 480.000 hektar dalam setahun. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu, 630.000 atau sampai dengan 1,09 juta. Disisi lain secara fungsional juga kita terus melakukan kinerja konserfasi dengan pelibatan masyarakat, sebagaimana terlihat pada halaman 21, 22, 23, 24, 25, 26 itu gambaran di lapangan baik di passet, di Sumatera Selatan, di Musorawas, di Tahura Minas, di Riau, Tabalong, Kalimantan dan sebagainya.

**Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat,**

Sementara itu penegakan hukum bidang EKK tahun 2015 sampai dengan 2018 telah menunjukkan penanganan pengaduan sebanyak 2637 unit pengaduan dan di tahun 2018 902, kemudian pengawasan perizinan 3135, kita juga telah menetapkan sanksi 541, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan di 18 perusahaan, dan 10 perusahaan setelah ikrah dengan nilai denda 18,3 triliun, sengketa lingkungan di luar pengadilan 132 kesepakatan, sementara itu juga kasus pidana P21 567 kasus, dan upaya-upaya untuk kerjasama dan memfasilitasi bersama-sama untuk kasus lingkungan di Kejaksaan dan Porli sebanyak 151 kasus. Kementerian juga berusaha untuk melakukan pencegahan dan pengamanan hutan yaitu, melakukan operasi pengamanan hutan sebanyak 881 kali, dan juga baik perambahan hutan tumbuh maupun dalam satwa liar, maupun dalam operasi pembalakan liar, dalam perambahan dan operasi pembalakan liar ini ke areal hutan yang sudah diselamatkan lebih dari 8 juta hektar. Sementara itu pada sisi lingkungan hidup pada halaman 29 dapat kami laporkan bahwa, berdasarkan RPRJMN 2014-2019 itu yang harus kita capai pada tahun 2019 adalah 66,5-68,5. Dari data tersebut untuk indeks kualitas lingkungan hidup itu 18 Provinsi mencapai angka lebih dari 66,5, dan 7 Provinsi masih kurang atau masih rendah seperti, Bali, Banten, Jaktim, DY, Jakteng, Jakbar dan DKI Jakarta serta Lampung. Jadi ini kami masih mengikuti dan memperlajari baik ke kualitas lingkungan hidup dari sisi udara, air, maupun dari lahan dalam arti cover dan penanganan lahan kritis.

Sementara itu penanganan sampah pada halaman 31 bisa dan mohon diperiksa. Saat ini terdapat 5244 Bak Sampah pada 219 Kota dan peningkatannya setiap tahun

7%, dan sampai saat ini ternyata 179.000 nasabah dengan pendapatan rata-rata bank sampah perbulan 40 juta. Kalau melihat datanya sampah yang ditangani 38,65 juta ton atau kira-kira pertahun 65-66 juta, jadi berarti baru 59% bisa ditangani dan yang bisa dikurangi atau dengan pendekatan perilaku dan mengurangi dari sumber, dan melakukan pengurangan sampah itu masih kurang dari 10%.

Selanjutnya,

### **Pimpinan yang kami hormati,**

Untuk perubahan iklim kita sudah mengikuti kegiatan terakhir kop dan Indonesia tidak termasuk yang tertinggal, jadi pada tahun 2018 ini rule book atau segala aturan main dan teknis, pedoman teknis berkenaan dengan langkah-langkah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu telah diberikan dalam bentuk cate wits catch wits packets program. Jadi tahun 2017 kita sudah berhasil menurunkan kira-kira 699 juta ton equipalend carbon, emiq dan ini baru dari hutan, dari penurunan dari kebakaran hutan ataupun deforestasi, dan dari industry semen. Selanjutnya berdasarkan evaluasi di dalam industry-industry Migas juga Sawit dan Manufaktur ternyata terdapat kira-kira 36 juta ton yang juga bisa dikurangi emisinya, oleh karena itu ini akan terus kita tingkatkan.

### **Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,**

Selanjutnya untuk tahun 2019 pada halaman 35 arah pembangunan lingkungan hidup mohon diperiksa untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, meningkatkan kualitas hidup maupun perbaikan tata kelola kawasan. Kemudian pada tahun 2019 ini Kementerian mendapatkan 5 mandat prioritas nasional dan program prioritas nasionalnya 3 dari 5, kemudian program prioritasnya 9 lalu kegiatan, kemudian prioyek, priogras, proyek Kementerian, mohon periska pada halaman 36.

Sebagaimana telah berkali-kali kami laporkan, menurut RKP 2019 pada halaman 37 untuk penanganan pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, mohon diperiksa hal-hal yang berkaitan dengan KMHK yaitu 3 dari 4 kegiatan. Demikian pula pada prioritas pembangunan nasional pertama, kemudian dirincian programnya mohon diperiksa pada halaman 39, baik program porefoal berlaria, kemudian perhutanan sosial, gerakan masyarakat hidup sehat, maupun peningkatann kualitas lingkungan dan uraian proyek prioritas sebagai mana terlihat pada halaman 40.

Selanjutnya pada priotitas nasional ke-3 peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian industry dan jasa produktif, mohon periksa pada halaman 41,

kegiatan yang berkaitan dengan nilai ekspor dan nilai tambah produk pertanian, termasuk penguatan penyelenggaraan fograsi system sertikuensi dan lain sebagainya. Dan uraian mengenai proyek prioritas nasional sebagaimana terlihat pada halaman 42 dan 43, dan juga uraian menurut program di halaman 44. Jadi sebaran aktifitasnya menurut program seperti produk HPHPL, KSDAE, Banglogy dan lain sebagainya. Selanjutnya pada program pemantapan pertahanan energy, pangan dan sumber daya air, pengembangan energy baru dan lain sebagainya, peningkatan daya dukung sumber daya alam, daya tampung lingkungan dan peningkatan kualitas dan aksesibilitas air pada halaman 45 sampai dengan halaman 49. Jadi kelihatan bahwa pada prioritas nasional empat ini pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air, PDSAL dengan kegiatan 2,900 triliun kita Kementerian mengupayakan untuk berbagai persiapan bisa diselesaikan pada sebelum bulan Maret ya Pak Sekjen ya. Baik kebun bibit, maupun bank persona dan sebagainya. Jadi sejak bulan Desember sudah dipersiapkan, mudah-mudahan sebelum akhir Maret harusnya karena kita sudah merencanakan di Februari-Maret, paling lambat Maret sudah bisa diselesaikan. Memang Ketua mohon izin, mohon insensitas untuk interaksi dengan tenaga ahli.

Selanjutnya untuk hasil kunker yang di Jawa Tengah persoalan ulusan untuk mengembangkan kawasan konservasi di HPT, kemudian juga tata kelolah air dan reboisasi penanaman, saya kira ini sudah sesuai dengan program Ketua di untuk perhutani 2019 kita akan melakukan penanaman pada 49.650 hektar dihalaman 57. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan badan aspek penggunaan air, kami akan berinteraksi dengan Kementerian PUPRA dan Pertanian. Untuk Provinsi Sumatera Selatan Taman Wisata Alam Puntika Ayu, mohon izin kami melaporkan bahwa kami sudah berinteraksi dengan Menteri BUMN dan kita memang mempunyai hutan-hutan yang letaknya dengan kota pusat pemukiman. Di tempat-tempat ini kita berharap masyarakat bisa belajar, sehingga saya bersama Menteri BUMN bersepakatan untuk melakukan Up Greetding Fasilitas dengan CSART BUMN. Dengan demikian hutan-hutan yang ada di Kota, di tengah Kota, di pinggir Kota bisa dipakai untuk rekreasi masyarakat dan edukasi masyarakat. Kemarin yang sudah dilihat di Sumatera Selatan dan Jambi yang kami akan memulai diskusi mengawali itu, dan sambil melakukan inferentarisasi. Karena saya melihat fariasinya berbeda-beda yang antara Provinsi dalam menangani hutan-hutan yang ada di dalam Kota atau di dekat Kota, tapi prinsipnya bahwa ini merupakan tempat yang baik dan kita akan fasilitasi, baik yang memungkinkan dari APBN atau pun dari DAK, atau pun DBH karena DHB buat Ahura juga boleh, atau pun dengan CSART BUMN. Selanjutnya yang untuk temuan kunker di Provinsi Bali terkait Bali Zoo, jadi soal satuan hewan Jerapah dan Zebra dari Thailand ternyata ada syarat-syarat yang belum dipenuhi dan mereka masih menunggu dokumen kesehatan dari satuan Jejarah, jadi sedang dipersiapkan persyaratannya.

## **Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormari,**

Terkait dengan RTRWP ada dasar hukum untuk ini yaitu Undang-Undang 26 tahun 2007 dan mohon periksa pada halaman 62, 63, dan 64. Selanjutnya kami laporkan bahwa reses persetujuan substansi Kehutanan untuk persetujuan di DPR RI berkaitan dengan DPCLS itu proses team terpadu untuk target telah diselesaikan di Sulawesi Selatan dan beberapa telah selesai, kemudian sebagian tetapi belum selesai.

Progress persetujuan perubahan mohon periksa pada halaman 66. 9 Provinsi masih berproses di DPR, 11 telah mendapatkan persetujuan di DPR, jadi terhadap proses progress persetujuannya, mohon diperiksa pada halaman 67 jadi masih ada 11.225.000, 11.62 hektar di 9 Provinsi. Kami juga telah mencatat kunjungan kerja Panja Komisi IV dan kita merencanakan untuk menyelesaikan ini, terutama di halaman 69 yang dikunjungi oleh team Panja pada Januari 2018 yaitu di KSAKPA (Kawasan Swakalam dan Pelestarian Alam) menjadi APL di Kawasan Dangku. Kami akan intensifkan lagi ini Pak Ketua, dan cek di lapangannya betul-betul untuk finishing touchnya untuk finalisasinya.

Selanjutnya demikian juga yang dikupang kita sudah tempo hari mencapai beberapa kesepakatan di 3 lokasi, tapi kelihatannya masih ada perambatan dalam ditindak lanjut karena beberapa sport harus dicross dengan perjanjian oleh Bupati, dan ini saya kira nanti planology akan insentifkan kembali di lapangan. Karena seharusnya dari gambaran ini 3 atau 4 sudah selesai mestinya, dari 225.000 hektar itu.

Kemudian berkaitan dengan isu-isu penting, tadi mengenai RAL telah kami laporkan. Kemudian program berbasis masyarakat yang paling menonjol pada Kementerian LHK adalah tadi rehabilitasi, iya Bank Pesona, Hutan Sosial, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bibir untuk masyarakat. Dan mohon diperiksa pada halaman 83, seluas 2,50.4.000.000 hektar telah diberikan akses kepada masyarakat. Sebetulnya yang paling penting disini bukan hanya diberikan aksesnya, tetapi pendampingan kepada masyarakat termasuk dengan bank Persona itu tadi juga termasuk. Bantuan ekonomi produktif, jadi selain dari itu. Diluar bank pesona masih ada bantuan ekonomi produktif untuk kelompok-kelompok perhutanan sosial, sebagaimana terlihat pada halaman 84, 85 progressnya juga termasuk berkaitan dengan hutan adat.

Kemudian soal Jawa Timur Pak Ketua, kami laporkan bahwa ini terkait dengan program penyelamatan sumber daya alam di tanah Papua yang dikordinasikan oleh KPK. Jadi operasi dilakukan dengan adanya informasi dan rekomendasi dari KPK, untuk menyelesaikan permasalahan NPL dan kepatuhan industry kayu di Papua. Dilakukan satuan pembentukan satgas, kemudian dilakukan post audit terhadap 10

perusahaan di Papua. Kami melihat berdasarkan informasi pada saat ini sedang dilakukan penindakan terhadap 40 kontener illegal di pelabuhan Tanjung Perak yang dibawa Kapal Hijau Jelita dan saat ini sudah ada tersangka 4 orang, sedang dikembangkan penyidikannya. Kemudian selain itu ada penindakan terhadap 57 kontener kayu illegal di pelabuhan Makasar yang dibawa oleh Kapal Street Masedang dalam penyelidikan. Demikian pula terdapat 88 kontener kayu illegal di pelabuhan Tanjung Perak di Kapal Oriental Gluf dan sedang di dalam pendalaman terhadap 199 kontener kayu illegal di pelabuhan Teluk Lamong Surabaya dibawa oleh Kapal Selat Masat. Total 384 kontener, 1 kontener itu kira-kira 20 ... 1 kontener.

**Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,**

Berkenaan dengan longsor dan banjir yang terakhir kejadian di Sukabumi. Pada dasarnya kerawanan longsor terkait dengan geologi, pasti jenis tanah, tofo grafik, kelerengan, curah hujan, termasuk tutupan lahan. Kemudian tidak semata-mata longsor dan lahan kritis atau tutupan, atau fegetasi bisa juga dia memang jenis tanahnya line slideding. Jadi begitu curah hujannya besar, jenis tanahnya jenuh, begitu tanahnya jenuh dia langsung jatuh, itu juga ada fenomena alam seperti itu juga ada. Tetapi memang yang paling banyak karena erosi berat rehabilitasi hutan dan lahannya yang harus diutamakan pada kawasan hutan lindung. RAL 2019 tadi telah kami laporkan, dan memang seperti yang kejadian di Sukabumi itu lebih dari 120 Desa berada disekitas kawasan yang kemarin itu slideding atau longsor, jadi Pak Dirjen KSDAE sedang terus mengikuti hal tersebut.

Kemudian berkaitan dengan Kalimantan Tengah tentang Kebun. Sesuai dengan intruksi Presiden nomor 8 tahun 2016, mohon periksa pada halaman 111. Itu terdapat beberapa situasi dimana dalam hal ini kepada Meteri LHK diperintahkan untuk melakukan penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk sawit, pengecualian untuk permohonan kelepasan yang telah ditanam dan diproses sesuai Pasal 51 PP104 2015, pengusunan dan verifikasi data pelepasan, kemudian mengidentifikasi kebun sawit dalam kawasan hutan, menidektifikasi dalam pelaksanaan 20% dari pelepasan untuk rakyat.

Jadi ini bagian yang harus di identifikasi dan pada saat ini sedang dibawas, dan sedang dilakukan evaluasinya karena inpres ini memerintahkan kepada beberapa Kementerian, termasuk Pertanian, Perindustrian, KLHK, dan beberapa yang dikordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Jadi oleh karena itu ini sedang diselesaikan, kami sedang melakukan evaluasi sebagaimana yang disampaikan oleh ... mengenai yang 800.000 hektar kebun sawit. Skema kurang lebih penyelesaiannya scenario penyelesaiannya bisa dimohon diperiksa pada halaman 113.

Demikian **Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,**

Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami siap menerima catatan dari berbagai arahan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikummussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dari BRG silakan.

**KETUA BRG (Ir. NAZIR FOEAD., M.Sc.):**

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota Komisi IV DPR RI, Ibu Menteri, Rekan-Rekan Pejabat Eselon I dan Para hadir semua.**

Secara singkat untuk melengkapi pencapaian di tahun 2018, kalau dari anggaran itu terbagi dari 2 anggaran yang dikelola oleh BRG langsung di Jakarta BRG Pusat. Penyerapan 90%, halaman 5 iya. Kemudian anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dari Riau, Jambi, Sulteng, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua melalui tugas pembantuan itu 82%, sehingga di rata-rata 86%. Mungkin bisa dimengerti rekan-rekan Pemerintah Provinsi ini tahun pertama mereka mengelolah anggaran untuk restorasi gambut melalui satker-satker Dinas LHKBU atau lainnya di Provinsi dan mencapai 80%, ini pencapaian yang lumayan sudah kerja berat.

Untuk secara fisik mungkin bisa loncat ke slide nomor 11. Total di tahun 2018 pencapaian untuk pekerjaan tugas pembahasan Gambut itu yang berada di luar kawasan berizin, konsesi itu dilakukan dan dikoreksi oleh BRG mencapai 478.000, 499 hektar atau hampir 480 buah hektar. Ini dilakukan oleh BRG sendiri 307.000 hektar dan kemudian dibantu mitra-mitra berupa LSM itu 170.000 hektar. Jika ini ditambah dengan luas dampak dari pembahasan dilakukan oleh perusahaan yang dikordinasi oleh Kementerian LHK tadi sejumlah 1,6 juta hektar di HTI, jadi tentu ini sudah mencapai 2 juta hektar secara total di tahun 2018. BRG juga bekerja di Desa-Desa melakukan sosialisasi di 18 Kabupaten di 17 Provinsi, di tahun 2018 kita bekerja 75 Desa, kalau dijumlah dengan jumlah Desa yang telah BRG melakukan sosialisasi dari 2016 sehingga 2018 itu telah mencapai 256 Desa dengan luas areal Desa sekitar 4,12 juta

hektar. Kita bersyukur masyarakat banyak yang semakin menyadari nilai penting Gambut dan Kepala 3 dilakukan survei persepsi yang dilakukan oleh pihak ke-3, itu kami cukup senang bahwa melihat jawaban dari masyarakat, itu pihak yang paling sering melakukan sosialisasi mengingatkan untuk tidak membakar gambut yaitu adalah aparat Desa. Jadi ini kita melihat dampak dari sosialisasi, sehingga aparat Desa lumayan efektif dan mereka paling sering bersuara kepada masyarakatnya untuk tidak membakar Gambut.

Selanjutnya juga atas arah Komisi IV DPR RI selama RDP di tahun lalu kita telah membuat 60 Dompok untuk PLTB atau pembukaan lahan tanpa bakar di 6 Provinsi, nah itu berjalan dengan cukup baik dari 60 Dompok ini dan kita mengajak tentunya selain rekan-rekan KHOHK di Provinsi juga Dinas Pertanian, Dinas BU dari Pemerintah Provinsi dan juga Litbang-Litbang Universitas. Kami harapkan di tahun 2019 Dompok pembukaan lahan tanpa bakar ini bisa dilakukan lagi dengan lebih massif, tentu melalui program Kementerian Pertanian dan mohon juga dukungan dari Komisi IV untuk memberikan arahan kepada Kementerian Pertanian dalam menyusun programnya memasukan program POTB ditahun 2019.

Selanjutnya kami telah memasang 100 alat titik pemantauan kebakaran Gambut di 7 Provinsi alat yang sudah terpasang dari 2016, hingga tahun lalu itu sampai tahun 2017 berjumlah 42 dan di tambah 100 lagi alat di tahun 2018, sekarang sudah ada 142 alat titik pemantauan yang real time itu memberikan aplik data paling tidak 1 x dalam 24 jam, jadi kita bisa melihat tingkat pembakaran Gambut dari 142 titik di 7 Provinsi dan tentu ini sangat membantu rekan-rekan dari satgas pengendalian kebakaran untuk menyipkan prioritas patroli dan seterusnya. Ini catatan kami di tahun 2018 dan untuk 2019.

Mohon ke slide di belakang, slide nomor 22, iya terima kasih.

Untuk 2019 dari pipi BRG itu 48% akan kami gunakan di pusat dan 52% dari anggaran itu diberikan kepada 7 Provinsi untuk kembali melanjutkan pembakaran gambut 7 Provinsi. Seperti demikian kegiatannya juga masih sama pada kegiatan yang tahun lalu, melakukan pembakaran gambut dengan pembangunan infrastruktur pembakaran, bantuan untuk bertani di dalam pemanfaatan gambut yang bertanggung jawab yang berkelanjutan berupa pokok-pokok ekonomi dan percontohan pembukaan lahan tanpa bakar, juga memperkuat system pemantauan terhadap upaya pengeringan gambut yang memang sudah dilarang sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2017, ada juga pemantauan tentang titik kebakaran gambut itu untuk membantu rekan-rekan satgas dalam kegiatan pencegahan dan mereka akan berpatroli.

Saya kira demikian Pak yang bisa kami tambahkan dari laporan Ibu Menteri.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Itu tadi saya lihat di BRG ada program pembinaan ekonomi Desa, coba slide sebelumnya bisa ditayangkan tidak, slide sebelumnya yang tadi, nah ini. Bantuan ekonomi produktif kepada 82 Desa, terlaksananya kegiatan jambore masyarakat gambut di Kalsel misalnya. Inikan contoh salah satu langkah kegiatan inikan bisa melibatkan teman-teman di daerah pemilihan, misalnya. Terus penyuluhan, kan kalau teman-teman di BRD didampingi oleh DPR RI ini saya pikir semakin mengungatkan akan peran kekompakan dan pentingnya jangan membakar gambut itu. Terus teman-teman di DPR ini kan yang mempunyai Dapil biasanya, ajak saja yang punya Dapil di undang, bila perlu langsung disaklek ada beberapa titik sudah ajak. Dan saya pikir bukan melanggar peraturan, toh saya pikir malah penguatan. Jangan-jangan masyarakat sekitar Gambut itu adalah pemilihan teman-teman.

Nah ini mungkin yang seperti ini Pak Nasir ini perlu 10 titik pemantau atau mungkin sumur pom, kan ada juga yang Bapak-Bapak sumur pompa, atau bangun embung, atau bangun kanal sikat bakar. Pada saat Bapak-Bapak dengar kanal pasti langsung membangun jembatan atau merehabilitasi kanal, tapi pastikan Bapak akhirnya akan membangun jembatan kanal itu sendiri. Ini juga kan kadang-kadang kalau dikawinkan buat masyarakat, dia menunggunya lama banget baru ada jembatan ini, ya jembatan yang mungkin jaraknya hanya 15-10 meter, itu sebagai misal.

Ini saya pikir Ibu Menteri terima kasih penjelasannya, saya tadi mengutip beberapa hal, saya salut komitmen Ibu terhadap pengaman sector kehutanan, focus Ibu bagaimana pemberdayaan masyarakat, kemudian bagaimana penguatan-penguatan di sector ini. Banyak program yang makin kesini, semakin bertambah dan saya pikir wajar, karena anggarannya kan juga tahun 2019 kan menjadi 9 triliun. Saya pikir kalau 19 triliun itu tadi anggaran Ibu 88,2% penyerapannya. Jadi kalau ini semakin intensif mengajak teman-teman di DPR untuk sama-sama menurunkan, kan tidak di cek benar atau salah itu kan Bapak Ibu mempunyai orang di lapangan. Misalnya KBR, dia KBR ini digunakan atau tidak, kadang-kadang KBR mereka ini memang sudah ahli bikin bibit, tapi faktanyakan uang ini kan tidak perlu uang dia bibit, nah uang ini bisa dipakai untuk keekonomian Pak, beli sapi, beli ini. Bolehkan Pak Hilman, engga kan Bapak dulu bilang boleh sekarang Bapak bilang nunjuk Pak Putra. Dulu harga bibitnya masih murah Pak ya 3500, sekarang sudah 2500, sekarang sudah 16.000, eh 15.000. Berapa Pak harganya sekarang, 15.000. Iyalah kalau menanam sekarang Bu orang pakai bibit



2000, dulu saya tau belinya 1500, begitu ada pencadangan 1 miliar pohon itu harga jadi 10.000. Wah rusak ini kantong saya, beli 10.000 saya harus habis berapa.

**Baik Bapak dan Ibu sekalian,**

Ibu Menteri ini mungkin ada dari teman-teman, yang jelas tadi Ibu Menteri sudah menggariskan, tinggal insensitas tenaga ahli untuk mensinkronkan tujuan pembagian kegiatan aspirasi ke daerah pemilihan. Itu yang paling adalah ke tujuan nanti teknis saja, Pak itu teknis saja itu teknis tujuannya biar dengan team saya pikir kita tidak perlu kita jelaskan satu per satu disini bahwa semangat dan apa yang ada sama dia tidak perlu disampaikan. Nanti biar tidak terlalu bertele-tele, disinikan bukan di, kita ngomong disini debat nanti ujungnya tidak jadi-jadi.

Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan?  
Sangat boleh Ibu Kasriyah, ditunggu-tunggu suara Ibu.

**F-PPP (Hj. KASRIYAH):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Yang saya hormati Pak Ketua,  
Yang saya hormati Ibu Menteri beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu Anggota DPR  
RI Komisi IV.**

Pak Ketua sehubungan dengan adanya yang disampaikan oleh Bupati Buton tengah Pak Ketua yang berkaitan dengan lokasi perubahan peruntukan yang dampak penting, yaitu yang luasnya kurang lebih 941.000 38%, 100 hektar. Untuk itu ini mohon nanti kepada Pimpinan untuk kita diskusikan mungkin lebih lanjut, tapi pada rapat yang terhormat ini saya akan menyampaikan dulu kepada Ketua bahwa surat ini yang ditanda tangani oleh Bapak Bupati Buteng dan surat ini sudah beberapa hari yang lalu sudah disampaikan kepada Bapak Ketua, saya yang menyampaikan langsung kepada Ketua yang dihadiri oleh Ibu Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Harus diserahkan kepada Ibu Menteri, langsung saja ini yang masalah lokasi lahan Buton tengah.

Nanti ini saja diterima saja, nanti biar Ibu serahkan ke anak buah Ibu.

Silakan saja Ibu Kasriyah.

Baik Pak Fadholi silakan.

**F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Ibu Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati,  
Bapak Ketua dan Bapak Ibu Anggota yang saya hormati.**

Hanya menyampaikan hasil rapat kordinasi yang kemarin yang digelar bersamaan dengan Perhutani, yang juga diakhir oleh Kehutanan, dan juga yang mengundang dari Perhutani.

Terkait dengan yang kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan dipinggiran hutan yang kemarin ada satu kesepakatan akan segera ada suatu tindak lanjut karena ini, mari saudara-saudara kita satukan bersama dan giat bersama-sama sesuai dengan wilayah Dapil masing-masing. Sehingga ini kami hanya mengingatkan apakah ini sudah dilaporkan kepada Ibu Menteri apa belum, agar hari ini bisa ditindak lanjuti bersama-sama baik yang ada diwilayah Jawa maupun yang ada di wilayah Perhutani.

Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan.

Kemudian yang kedua yang ingin bertanya saja, karena ada satu yang dulu juga pernah saya sampaikan bahwa di daerah saya ini ada satu dusun ya yang sudah mengajukan suatu pelepasan untuk kepemilikan tanah, tapi itu di wilayahnya PTPS surya dan dusun-dusun lain itu sudah dilepas. Kami dulu sudah pernah menanyakan apakah ada kaitannya dengan Kementerian apa tidak, itu langsung kepada PTP berarti Ibu ya jadi tidak ada kaitannya. Oh langsung baik.

Baik kalau begitu karena tidak ada kaitannya maka pertanyaan dicabut dan tidak jadi.

Baik terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

## **KETUA RAPAT:**

Pak Fadholi ini ngomong disini padahal bisa langsung biasanya ngomong di rumah, tapi mau menunjukkan bahwa Pak Fadholi sama juga dengan kita-kita yang partainya berbeda. Jadi intinya yang disampaikan Pak Fadholi adalah kalau sebelum Maret bisa kenapa harus menunggu Maret, kan begitu.

Silakan Pak Rahman Handoyo.

## **F-PDIP (RAHMAD HANDOYO., S.PI., M.M.):**

Baik,

*Bissmillahirrahmaanirrohiem*

*Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh*

## **Ibu Menteri, Pimpinan dan rekan-rekan sekalian Ibu Bapak yang saya hormati.**

Pengawasan, saya kira melihat data yang ini saya cukup gembira Ibu Menteri. Soalnya cuman setelah gembira juga ingin nambah lebih bergembira lagi, kalau usulannya diterima.

Ada hal yang bagus saya kira, ada hutang-hutang produksi kita yang tidak produktif saya senang. Semua sector, semua liny, semua Kementerian mendukung upaya Pemerintahan datangnya pertahanan pangan nasional. Ini saya membaca lampiran dari Ibu terkait dengan adanya panen perdana jagung ini, saya kira saya meminta lebih artinya teman-teman Kementerian itu mencoba memapping lagi yang lebih optimal lagi, yang lebih maksimal lagi wilayah-wilayah hutan mana yang lebih produksi yang masih kosong, yang masih tertidur terlama, saya kira ini perlu di indentifikasi. Kalau 15 ton panen kemudian sebatas 15 keluarga saya kira cukup membantu dan tanggap meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutang. Dan saran lebih mikro lagi cukup membantu penguatan jagung kita dari sana swasembada jagung ketahanan pangan jagung kita, karena memang akhir-akhir ini jagungkan kinerja Pemerintah bagus, ternyata ada mengalami kendala ketika harga jagung naik sehingga berimbas ke pternak kita.

Nah ini saya percaya Ibu sudah mempunyai anggaran, punya peta tinggal bagaimana apakah perlu disinergikan, perlu swipesing. Kemaren kalau cuman di 98% dikatakan jelek juga tidak, bagus banget juga tidak. Lah berarti masih ada 2% sifa masuk di tahun berikutnya, ini kalau masih bisa dioptimalkan kenapa tidak, suatu hal

yang barang kali kalau ternyata tahun ini anggaran itu tidak memungkinkan 100%, saya kira teman-teman Sekjen dan Dirjen bisa taulah mana-mana yang tidak bisa ditumbalkan 100%. Nah ini bisa dialokasikan kepada masyarakat-masyarakat kita yang mencoba kita tarik, kita berikan ejektif untuk bisa menanam lahan-lahan itu. Saya kira ini sangat bermanfaat buat masyarakat di sekitar hutan.

Yang kedua masalah penegakan hukum saya mendengar sudah membaca, saya kira cukup bagus kinerjanya, saya kira dalam rangka menyelamatkan anggaran bertriliun-triliun saya kira sudah intra sekali suatu hal yang patut diapresiasi, sehingga ini menjadi tambahan-tambahan kedepan ke dalam tangga untuk menjaga hutan kita. Kalau memang itu untuk menyelamati kita harus tidak boleh mundur selangkah pun, kita harus tetap maju untuk benari hutan kita. Saya kira ini apresiasi buat Kementerian terkait dalam tanggapan satker rekan hukum kita ditahun 2015-2018, meskin pun ada sana-sini bolong ya kita harus maklumi lah, tetapi teman-teman ada LSM, ada masyarakat yang kuat, ternyata pengawasan kita agak lemah, ternyata ini sudah data menunjukkan.

Berikutnya Ibu Menteri isu kekinian lingkungan Ibu. Sebenarnya sudah pernah disampaikan kebijakan Ibu Menteri terkait pembatasan plastic, nah isu ini menyual kembali mengemuka lagi ketika ada hiu yang mati gara-gara dipenuhi oleh plastic itu. Bisa tidak kita mengambil langkah drastic dari lingkungan hidup. Kalau kita berbelanja itu karungnya bukan karung tentengan plastic, seperti di luar negeri itu lah ada kertas, nenteng juga megangnya pun pakai tangan dua. Saya kira ini juga ada dari Kementerian Lingkungan Hidup semua Kementerian harus berbicara itu, tapi paling tidak karena Lingkungan Hidup itu yang paling membawa dari Ibu Menteri, jadi saya kira harus ada langkah drastic nyata, terstruktur, kelihatan, teks boks bahwa ada kebijakan aturan terkait dengan pembatasan plastic, itu kalau bisa masyarakat negara akan memantusias Ibu. Bertumpuk-tumpuk semuanya plastic, belum dari sisi ekologi itu pasti akan membahayakan juga. Nah untuk itu saya mohon dengan sangat ada pelangkah nanya juga, walaupun dulu sudah ada langkah nyata, kemudian ada pro dan kontra saya kira hal yang wajar, tapi saya kira saya mengusulkan itu dulu Ibu Menteri. Kalau tahun ini ada waduh saya senang sekali, permohonan saya atau parlemen juga masyarakat yang lain terkait pengendalian plastic itu benar-benarnya, keadilan negara itu benar-benar nyata terhadap pengendalian. Implikasinya memang industry plastic akan mengalami, itu suatu pilihan lah.

Begitu Ibu Menteri yang dapat saya sampaikan sedikit.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Merdeka!

**KETUA RAPAT:**

MERDEKA.

Silakan Pak Hasanuddin.

**F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pak Ketua dan rekan-rekan sekalian, Ibu Menteri yang berbahagia**

Sekalianlah saya mau, yang penting sebelum Maret sudah selesai.

Ada 3 isu yang ingin saya sampaikan,

Pertama masalah ilegallogging di Sumatera, Sumatera Barat wabil khusus. Nampaknya adem-adem saja tapi ada surat yang beredar, dijual pada pengusaha kayu padahal kayu itu ilegallogging, tapi bisa jalan karena ada surat yang dijual 500 ribu perkubik, ada tanda tangan disana katanya lolos dipemeriksaan kepolisian, itu di daerah Sumater Barat dan Jambi khususnya. Jadi ada pengusahaan kayu membeli surat kepada opnum Kehutanan lah, disinyalirlah ada opnum yang menjual itu.Boleh diturun team ke daerah Sumbar dan Jambi, itu yang pertama. Menurut info juga di beking oleh pusat baik dari kepolisian maupun dari aparat TNI, jadi sehingga mereka bisa lolos. Itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun terjadi pembalakan liar Sumatera Barat dan Jambi.

Itu yang pertaman. Yang kedua.

Dulu ada izin untuk penguasaan hutan setelah kayunya ditebang dan ditinggal sehingga masyarakat menanam sendiri kelapa sawit dan karet, setelah ditanam datang opnum yang lama seolah-olah mereka masih memiliki izin dan menakut-nakuti rakyat yang sudah menanam karet sama sawit. Jadi ini perlu disurvei ke lapangan di daerah Jambi dan Sumatera Barat, karena mereka sudah mau panen. Nah setelah ditinggal oleh mereka ditanam oleh masyarakat adat, sesudah mau panen datang lagi opnum yang tadi sudah memiliki izin padahal izinnya sudah habis, menakut-nakuti rakyat

supaya dibagi hasilnya kepada mereka. Itu perlu turut dari pusat ke Sumatera Barat dan ke daerah Jambi.

Kedua perilah pelaksanaan budi daya kopi hutan lindung, di Sumatera Barat banyak sekali tanah-tanah yang berdekatan dengan tanah adat, sehingga untuk menentukan mana tanah ada mana hutan lindung agak sulit di Sumatera Barat. Sehingga dengan adanya edara dari Ibu Menteri tentang penanaman kopi di hutan lindung, menurut saya pribadi dan setelah kami turun ke lapangan mereka ingin mengetahui bagaimana tata cara untuk menanam kopi di hutan lindung, dan siapa yang membiayai, dan bagaimana nanti dengan hutan ada yang berdampingan dengan hutan lindung tersebut. Karena mereka tidak tau batasnya mana hutan lindung dan mana hutan adat.

Ketiga masalah Lingkungan di Sumatera Barat, khusus di daerah Alhan Panjang, ini berkaitan dengan kotoran ayam. Kotoran ayam langsung di bawa langsung dari kandang ke ladang petani, sehingga baunya luar biasa dan merusak pertanian di daerah Sumatera Barat. Karena kotoran tadi tidak di kompos dulu sebelum dimasukan ke ladang, sehingga harus dibunuh dulu bakterinya dengan pestisida yang sungguh luar biasa merusak lingkungan. Apakah ada hubungannya dengan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup masalah kotoran ayam yang langsung di bawa dari kandang ke ladang pertanian. Mohon nanti diberikan penjelasan apakah ini tanggung jawab dari Kementerian Pertanian atau tanggung jawab dari Kementerian Hidup.

Itu saja terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pak Erislan, kami persilakan.

**F-HANURA (Dr. ERISLAN, S.T., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Ibu Menteri dan Pimpinan Komisi IV DPR RI, Anggota Dewan Komisi IV Semua, kemudian Bapak dan Ibu jajaran Kementerian Perhutanan.**

Perkenalkan nama saya Dr. Erislan., S.T., M.M. kebetulan saya adalah Anggota baru disini Bapak Ibu, pengganti TAWI dari Dadang Rusdiana Fraksi Hanura. Saya dilantik tanggal 3 November kemarin dan semenjak itu saya sudah aktif di Komisi IV dan mengikuti kunjungan-kunjungan kerja maupun rapat-rapat di Komisi IV.

Boleh saya mengasih pengantar sedikit bahwa masalah Indonesia saat ini adalah masalah data, saya dulu waktu kuliah S3 Profesor saya bilang, orang luar negeri itu tidak percaya dengan data. Kalau Indonesia menyampaikan data kata dia, kurangi dia 40% gitu loh. Apalagi Indonesia ini menyampaikan data bukan dengan teknologi gitu ya, mungkin dengan excel gitu ya, dengan catatan-catatan. Bagaimana akurasi data itu bisa dipercaya, karena data ini penting bagaimana kita meletakkan suatu data ketika data inputnya itu salah. Ini pengantar begini Bu ya contoh, nanti masuk ke perhutanan sendiri. Contoh, waktu itu Profesor saya mempunyai kerja sama dengan Profesor dari Inggris kemudian untuk membangun pelatihan ekonomi dari kecil ya, kemudian diminta Profesor untuk mengumpulkan data-data UMKM-UMKM yang ada di Indonesia, kemudian sudah selesai minta ke Kementerian Perindustrian datanya, kata Kementerian Perindustrian, Pak data ini sudah sangat failed, sudah sangat failed tidak ada lagi yang lebih failed dari ini. Jadi karena datanya itu sangat failed maka di undangilah UMKM itu, ternyata apa yang terjadi begitu di undangin surat undangan itu kembali semua karena alamatnya sudah tidak ditemukan, nah ini contohnya.

Nah terkait kehutanan ini masuk keintinya bahwa Anggota DPR sebagai fungsi pengawasan mendengar ya, bahwa apakah memang hutan ini sudah mempunyai data yang rinci ya mengenai hutan-hutan yang misalnya, digunakan untuk misalnya perkebunan sawit ya baik itu guna pakai. Karena bisa saja begini informasi yang saya terima bahwa misalnya, kontraknya dengan Menteri Kehutanan itu yang lahan sawitnya 60 hektar tetapi kenyataannya yang dipakai 80 hektar. 20 hektar ini kan tidak masuk kepada pajak negara begitu loh. Nah apakah dalam langkah penegakan hukum di kehutanan ini sudah dilakukan pengawasan-pengawasan terkait ke failedtan gitu ya, kontrak dengan realisasi yang ada di lapangan.

Itu satu, yang kedua.

Masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata. Kebetulan penelitian saya banyak di Kabupaten Bandung dan di Kopus, di Ciwidey tanah Dapil saya, kemudian Lembang. Dipenelitian saya itu kalau memang pemanfaatan hutan ini tujuannya untuk menambah ekonomi defisa untuk negara melalui hutan wisata atau kawasan wisata, maka jangan banci begitu loh. Saya lihat di kawasan Tangkuban Perahun itu ya, itu kerja masalahnya adalah Pemerintah dengan Mitranya, gonta ganti Mitra ya, hari ini dikelola PT ini begitu di demo diganti lagi ke PT

yang lain, akhirnya yang terjadi adalah apa pengelolaan kawasan yang tidak maksimal. Jadi ada tiga hal wisata ini yang bisa membuat dia maksimal, bisa mendatangkan dia pengunjung yang banyak, ya ujungnya kepada pendapatan ekonomi. Yang pertama adalah bagaimana ke mitraan, menjalin kemitraan, tentu kehutanan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang mengelola hutan wisata menjadi tempat wisata kan seperti itu. Nah kemitraan ini kan bukan asal mitra, mitra yang benar mampu mengelolah hutan wisata ini menjadi wisata yang bagus, yang baik yang digemari bila perlu sampai ke luar negeri. Selain itu ada kreasi-kreasi nilai yang dilakukan oleh mitra itu, nah maka kalau mitranya asal-asalan kita asal kontrak ya terjadi ya pengelolaan kawasan wisata itu juga terkesan asal-asalan. Kalau masalah pengunjung banyak tapi pendapatannya sedikit, ya untuk apa ya. Kaya dicontoh di Ciwidey kawasan kawah putih itu pengelolannya tidak benar, ya pungutan pemasukannya. Pungutannya mereka itu biasanya illegal tidak pakai karcis resmi. Nah ini kan pengawasan-pengawasannya yang harus perlu terlu dilakukan ditingkatkan begitu, supaya nantinya pendapatan pemanfaatan hutan itu yang misalnya tujuannya untuk masyarakat sekitar, kemudian untuk peningkatan ekonomi negara bisa tercapai secara penuh.

Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan,

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaiakumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Silakan Ibu Felicitas.

**F-GERINDRA (Dr. Hj. FELICITAS TALLULEMBANG):**

Terima kasih.

**Pak Ketua, Ibu Menteri dan seluruh jajarannya.**

Pertama-tama saya ingin menyampaikan keluhan dari Dapil saya dari Timur. Di daerah Brau situ ada pabrik kelapa sawit yang diberi ising oleh Pemerintah daerah yang berada di dalam lingkungan penduduk padat, ada sekolah, ada rumah ibadah, ada perumahan yang sangat padat dan Pemerintahan Daerah setempat sudah memberikan



ising. Saya kesana sampai malam-malam harus mendatangi dan banyak sekali orang saya bilang, saya akan sampaikan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup mungkin bisa dikomunikasikan dengan Bapak Bupati setempat.

Yang kedua dari daerah Timur juga, daerah hutan yang belum dilepaskan dan sudah ditanami oleh penduduk dan juga diklaim oleh PT. Faleh, ini ada persengkeakan antar penduduk setempat dengan PT Faleh. Penduduk sudah menanam dengan merica yang jangka pendeklah Ibu Menteri yang jajarannya, tetapi dari PT Faleh itu sendiri mengklaim bahwa itu adalah wilayah mereka. Ini mungkin perlu Ibu Menteri mohon bantuannya untuk mensinergikan supaya tidak ada bisikan antara masyarakat dengan PT Faleh dibawa.

Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kemudian dari Dapil saja juga di tanah Toraja Utara itu PLTA yang lagi dibuat oleh PT kalau tidak salah tulisannya disitu tulisan China, saya tidak begitu baca tetapi ada nanti saya akan sampaikan ke Menterian. Saya melihat dia membabat hutan, kalau menurut pikiran saya ini tidak sesuai karena penuh lumpur dan gundul-gundul disekelilingnya, padahal dari hulu itu ada DAS sungai Desa dan mengalir. Oleh karena itu saya sangat meminta tolong perhatiannya Ibu Menteri dilihat PLTA itu dan juga Kecamatan Pangala disekitarnya sudah mengeluh, bahwa mereka kalau mengambil air kan mereka mekai sumur-sumur dangkal Bu sudah bau, jadi mungkin dia membikin sumur sekitar pinggir-pinggir sungai. Dulu si diambilnya dari sungai saja, tapi sekarang dibikin masih tetap bau. Saya lupa PT apa namanya, saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati Toraja Utara, beliau mengatakan akan dilihat tetapi tetap saya akan katakan kepada Ibu Menteri supaya isinya mungkin mudah-mudahan bisa diperbaiki.

Dan selanjutnya satu lagi bahwa penitipan saya sudah saya sampaikan tadi sebenarnya kepada Ibu Menteri, bahwa hulu sekitar sungai Sahdan itu sudah sangat kritis, saya keliling sampai ke ujung perbatasan dengan Sulawesi Barat, dengan Sulawesi Tengah itu hutannya sudah hampir habis Bu, sungai Sahdan juga tinggal lumpur yang mengalir.

Itu saja Ibu Menteri, semoga mudah-mudahan bisa ada jalan keluarnya.

Terima kasih, terima kasih Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik Bapak Ibu sekalian.

Oh silakan Pak Cucun.

Tidak, masih ada lagi Pak selain Pak Hary masih.

Bapak duluan apa Pak Salim duluan, Bapak duluan tadi yang angkat tangan Pak Salim terakhir.

**F-PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.):**

Terima kasih Pimpinan ku yang sangat baik sekali dan baik hati yang paling ganteng.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pimpinan Komisi IV, sahabat-sahabat Anggota Komisi IV, mitra kerja, Ibu Menteri dan jajarannya, Pak Sekjen yang tambah ganteng.**

Pertama saya mendapat wa dari aliansi Cagar Alam Jawa Barat, iya Bu Menteri mungkin suratnya sudah masuk ke Ibu Menteri, terkait keputusan nomor SKU Menteri 25/M Menteri LHK Sekjen yang terkait penurunan atau perubahan fungsi dalam fungsi kawasan hutan dari Cagar Alam Kambojang. Karena daerah pemilihan saya yaitu baru saja saya mendapatkan whatsapp, mereka menolak surat keputusan yang dikeluarkan yang tahun 2018 itu. Jadi terus pada berdatangan saya bilang, nanti saya meminta penjelasan dulu dari Ibu Menteri karena kemarin agak sedikit lama saya jalan-jalan dulu luar Komisi IV.

Yang pertama saya kasih pertimbangan melakukan perhatian serius ya dari semua pihak, terkait pengelolaan kawasan yang Cagar Alam. Karena kalau Ibu yang rumahnya di Majalaya seperti saya Bu, itu korban rakutan itu ya korban dari gunung yang di Kamojang itu pernah Ibu turun sama Pak Presiden ke Jakarta, satu kali itu kita mengalami banjir terbesar itu setelah Ibu pulang dari hulu sungai Citarum waktu itu semua tergenang, yang tidak pernah ke rumah saya masuk banjir, Ibu pulang dari Bandung itu banjir besar itu Bu, ya bukan karena Ibu gitu ya. Tapi ini lah Rakutak yang perlu penanganan lebih serius dan saya juga pingin tau guti masukan Ibu yang dipercayakan untuk penanganan rehabilitasi lahan-lahan yang ada di Rakutak ini seperti apa. Kemudian juga apakah tidak dipertimbangkan kawasan Cagar Alam yang dialih fungsikan menjadi lahan konservasi ini akan merusak nanti ekosistem yang ada disana, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan kalau kawasan ini sudah dirampas menjadi kawasan wisata, memang bagus Bu untuk TAD baik Pemerintahan daerah atau kemudian juga penenjang-penenjang lainnya, kita sekarang juga sudah enak ke Garut tidak perlu lewat Nagrek bisa lewat Kamojang. Ya tetapi ya ini masih tarik

menarik kata Pemerintahan Kabupaten Garut dengan Pemerintahan Bandung ini penanganan pemeliharaan kawasan itu belum jelas ya, memang harus Ibu yang panggil lah Gubernur sama Kabupaten, apa dua Bupati itu yang menangani terkait kawasan yang penurunan dari Cagar Alam ke lahan taman wisata alam.

Kemudian juga monitoring dari pihak Kementerian yang sampai sekarang kemarin pernah terjadi Bu gesekan dibawah teman-teman yang LMDH dengan program perhutanan sosial yang mereka ini mempunyai KTP dari Banjar, punya KTP dari Bogor, ya mungkin bisa derek dengan Ibu kok dapatkan lahan perhutanan sosial di wilayah saya, saya juga tidak dapat loh Bu orang Bandung asli. Ini kan aneh, ada yang teman-teman yang akhirnya gesekan di bawah yang terjadi itu karena perhutanan tolong ditertibkan juga ya Bu. Karena ini aspirasi juga dari Pak Bupati waktu saya bertemu dengan Pak Bupati, tolong kang ini disampaikan biar kalau misalnya bisa bersama ya saya juga mewakili masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat menetapkan SK tentang perhutanan soal ini kami ajak ngobrol dong Bu ya.

Pak Sekjen, pura-pura tidak dengar ini Pak Sekjen, ini dengerin dong.  
Oh dicatat ya, kirain tidak di dengar,

Itu jadi yang terjadikan akhirnya gesekan yang dibawah datang ya ke kami, ya tolong disampaikan di forum rapat kerja dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup permasalahan-permasalahan ini.

Itu saja Bu saya meminta penjelasan, lama juga saya tidak ketemu sama Ibu dan Bapak-Bapak.

Terima kasih Pimpinan.

*Waallahu Muafik Ilakaumiltoriq  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Itu Sekretaris Fraksi PKB Bu, jadi kalau beliau sudah ngomong itu mewakili Fraksinya. Jarang ngomong seperti ini tapi memang saya juga sempat mendengar itu Bu.

Silakan Pak Salim,

Bicara Rakutak juga, oh tidak.

**F-GOLKAR (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Pak Ketua yang kami hormati, Ibu Menteri dan jajarannya**

Sekedar melaporkan saja Ibu Menteri. Sebelum terakhir di Dapil saya Aceh terjadi banjir bandang Bu, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara 4 kali terjadi banjir bandang dan menurut kata masyarakat sudah 60 tahun tidak pernah banjirnya seperti ini. Ketempatan Ibu Menteri ketika banjir saya memang lagi di Dapil di daerah tersebut banyaknya kayu gelondongan yang hanyut dari atas pegunungan, mungkin kayu gelondongan tersebut bukan ilegaloging sekarang Ibu Menteri, mungkin yang 10 atau 15 tahun yang lalu soalnya sudah tua-tua. Cuman mungkin harapan kami melalui Ibu Menteri apa salahnya gunung-gunung yang mungkin sudah gundul itu kalau memang ada program untuk menanam pohon-pohon yang keras atau pun yang lainnya Ibu Menteri, karena disitu adalah kawasan taman nasional gunung Loser. Harapan kami kepada Ibu Menteri sampai saat ini perhatian dari Dinas Provinsi dan Kementerian belum ada.

Demikian saja Pak Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik masih ada lagi?

Saya pikir teknisnya yang paling penting nantinya dari tenaga ahli kita masing-masing berkomunikasi tinggal atur jadwal, tadi Pak Sekjen menyampaikan, tidak semua tenaga ahli hadir, itu masalahnya. Tolong saja dikondinasikan makanya dibagi dua termin saja atau berapa termin Pak Sekjen. Kalau Pak Sekjen mau bertemu langsung saya pikir, Bapak kan mempunyai staf-staf banyak. Yang penting teknis pelaksanaannya supaya nanti ajuan usualannya jangan double, jangan bertabrakan atau bahkan syarat-syaratnya tidak pas.

**Bapak Ibu sekalian,**

Silakan Bang Umar Aرسال.

**F-PD (Drs. H. UMAR ARSAL):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Yang saya hormati Ibu Menteri**

Saya singkat saja memberi masukan.

Ibu Menteri kami kemarin dengan Kementerian Kelautan ada oleh-oleh ditahun politik berupa pelatihan untuk budi daya perikanan, kami juga mengharapkan di Kementerian Kehutanan ada semacam pelatihan yang dilaksanakan. Misalnya terkait dengan pemukiman di jalur hutan atau di sungai dalam rangka penanganan bencana sosialisasi. Mohon diprogramkan untuk kita karena di daerah-daerah kita ini juga banyak rawan bencana, semoga bisa juga paling tidak 3 atau 4 Kabupaten yang memang kita anggap rawan terutama aliran sungai di hutan lindung, terutama pemukim-pemukim yang tinggal di kawasan hutan.

Mungkin itu saja Bu, semoga di Kementerian Kehutanan juga bisa memberi oleh-oleh untuk pelatihan dan pesertanya nanti kita rekrut yang betul-betul yang tinggal di pemukiman-pemukiman tersebut.

Mungkin itu saja, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Iya kalau sudah tidak ada lagi kita,

**F-PDIP (RAHMAD HANDOYO., S.PI., M.M.):**

Terakhir ini Dan, mumpung ingat.

Jadi wilayah kami itu Ibu Dirjen yang membidangin lingkungan ya, wilayah industry Ibu, Bu Ilal itu proidmintransi. Sekarang tanah begitu mahal banyak industry disana, saya ingin ada bimbingan teknis terkait dengan lingkungan Ibu, pelaku-pelaku industry disana kalau disini sudah bebal yang sudah banyak pelaku industry, kemudian lingkungannya sudah sedemikian kurang bagus lah begitu lah. Saya mengingat disana jangan sampai di sekitar JABODETABEK yang sungainya begitu hitam, nah saya minta

tolong, entah mau dilakukan apa tidak mengerti penguatan, sosialisasi terkait dengan pelaku-pelaku usaha disana yang melibatkan masyarakat disana. Karena Boyolali itu setiap tidak paling sedikit sekitar 1 triliun tahun masuk ke daerah kami Bu baik industry dan renolikasi industry mau pun industry baru dari luar negeri masuk kesini. Dan ini lebih baik sedini mungkin kita tata kelolah untuk lingkungan kita biar tidak sedemikian tercemar dari industry itu yang masuk.

Barang kali kalau berkenan usulan saya ditindak lanjuti kalau tidak, namanya juga usulan Bu ngeh.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabaraktuh*

**KETUA RAPAT:**

Mana ada yang berani menolak usulan dari PDI Perjuangan.

**Baik Bapak Ibu sekalian,**

Ibu Menteri ini masukan dari teman-teman dan Pimpinan tadi, Pak Michael saya pikir sudah dari hutan tadi Pak Michael.

**F-PD (Dr. MICHAEL WATTIMENA., S.E., M.M.):**

Saya Pak Ketua dengan melihat keseriusan Ibu Menteri dan senyem Ibu Menteri sudah dapat bisa mengobati seluruh kegelisahan dan keresahan kita lah.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Ibu Menteri ini lebih spesifik dari pada Menteri yang satunya.

Silakan Pak Nasyit.

**F-PD (Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajarannya**

Ibu Menteri singkat saja,

Itu di Bone di kampungnya JK itu ada, karena JK inikan wakil Presiden Ibu kan Menteri, wajar dong harus disinggung, satu kampung itu saya itu Pak JK.

Jadi begini Bu, jadi di Bone itu ada di ketinggian 1900 Meter dari permukaan laut dari minsi level, itu ada jalan sudah pernah dibangun 300 Meter tapi dihentikan, jadi masih ada 700 Meter lagi, masuk kawasan hutan. Kemana kami harus izin bermohon supaya yang 700 Meter ini bisa dilanjutkan, itu saja Ibu Menteri. Mohon petunjuk nanti, mudah-mudahan ini bisa berlanjut.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Silakan Pak Sudin.

Baik Ibu Menteri dan teman-teman saya pikir sudah terwakili, cuman yang satu belum disinggung tentang tata ruang wilayah tadi RTRW. Kita memang dalam periode ini cenderung sangat minim menyelesaikan RTRW dari 20 baru selesai 11, itu pun 11 masih sebagian parsial, yang 9 juga belum kita sentuh karena kita juga menganut azaz kehati-hatian, tapi kalau 4 tahun kehati-hatian terus repot juga kalau kita tidak memulai.

Jadi nanti mohon yang RTRW mana yang kira-kira secara prinsip tidak terlalu bermasalah bisa di dahulukan. Kemaren kita sudah secara parsial memulai yang ketri, tidak mudah memang tapi ya bertahap. Ada yang tidak dilepaskan langsung diturunkan saja masih milik kehutanan, saya pikir juga bagus. Nah di Sumatera Selatan juga kemarin ini aspirasi juga dari daerah saya, kebetulan Dapil saya dan kita sudah besuk kesana. Kemarin ada beberapa masukan-masukan yang perlu di dalami, saya pikir

yang sudah kami sampaikan lewat Dirjen Pranology, mohon ini segera ditindak lanjuti nantinya untuk secara teknis supaya tidak salah arah nantinya.

Kemudian tentang sigap tanggap saya juga apresiasi tindak dari staf-staf Ibu, mudah-mudahan bukan karena Ketua Komisi IV yang telfon, saya yakin juga siapa pun yang telfon itu tanggap darurat kebakaran hutan. Ternyata tidak hanya kebakaran hutan di Sumatera yang menjadi sorotan, kemarin waktu tidak sengaja, bukan tidak sengaja, ada kunjungan kami acara pernikahan salah satu junior saya, pas di Garut itu depan mata kebakaran besar sekali Bu. Itu mungkin belum tentu besar sekali disitu Bu dan *alhamdulillah*, begitu kita telfon anak buah Ibu sigap tanggap dan tidur di lapangan sampai pagi jam 6 api padam. Tapi memang disana unik api padam, siang ada angin nyala lagi. Nah ini mungkin harus juga dipikirkan. Namanya Gunung Guntur, ini punya keunikan bagi masyarakat situ. Masyarakat situ menganggap kebakaran hutan adalah tanda mau musim hujan, tapi kita tidak bisa begitu, karena memang pada saat memadamkan juga tidak ada kepastian. Tapi *alhamdulillah* belum pernah sampai separah-parahnya belum pernah, tapi tidak akan mungkin kita pasrah seperti itu. mungkin perlu dibangun system atau apa, apa Gunung Guntur masuk perhutani ya, nanti di dekat kantor perhutani itu dari teman-teman Perhutani juga sigap. Saya kemarin mau sidak itu saya lihat, sudahlah capek ternyata teamnya sudah turun sama orang-orang dari kehutanan. Nah hal-hal yang seperti ini perlu kita seterbatasannya kita mempunyai kepemilikan, insprastruktur mungkin tidak ada alasan makanya ini terus untuk kedepan mudah-mudahan terus berkembang.

Saya pikir ini Ibu Menteri dari teman-teman, mohon segera

#### **F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Ketua Instruksi sedikit Pak Ketua, menindak lanjuti Pak Ketua ngomong tadi.

Mengenai ETWP Bu Menteri,

Saya tidak mau RTWP ini cuman menjadi pemutihan, itu saja. Karena nanti dianggap, oh RTWP ini bisa bla-bla-bla-bla oh ternyata ini pemutihan. Contohnya Kalimantan Tengah, saya sudah sarankan dari Gubernur priode yang lalu sampai Gubernur sekarang namanya H. Sugianto saya sudah sarankan, segera ajukan RTWP tapi dianggap beliau angin lalu. Bahkan waktu itu yang bersangkutan mengatakan 800 ribu sekian kebun illegal di Kalimantan Tengah tapi sampai hari ini kami meminta datanya tidak dikasih dan Komisi IV sudah memanggil 2 kali, ke 3 kalinya nanti pada tanggal 22 jam 13. Ya mudah-mudahan yang bersangkutan insyaf sadar bahwa ini ada tanggung jawab sebagai pejabat negara.



Kemudian yang kedua Ibu Menteri kunjungan kami reses ke Batam, ke Kepri yang dipimpin oleh Pak Danil Johan. Jadi yang dikatakan, dilepaskan, diputuskan bersama Komisi IV dan Kementerian Prihal kawasan hutan buhu maupun kawasan yang lain-lain dilepaskan ternyata, sebagian besar sudah sekian 10 tahun itu menjadi komplek perumahan, jadi itu omong kosong. Jadi mungkin yang salah juga bisa dari Komisi IV segampang itu mengetok palu, bisa juga kurang telitinya dari LHK dalam diputuskan oleh team terpadu. Karena kami sangat percaya dengan Ibu dengan LHK, tapi diputuskannya itu kok menyangkut komplek perumahan. Betulkan Pak Danil, waktu itu Pak Danil Johan yang memimpin saya cuman anak buah Bu, jadi saya cuman mengikuti apa yang disepakati oleh Pak Danil. Itu Mbak Ita komplek perumahan apa waktu itu, hah, ada mungkin 5-6 komplek perumahan. Jadi itu yang diputuskan sama juga dengan pemutihan, begitu loh. Sudah sekian 10 tahun jadi komplek perumahan, dijual kepada masyarakat tapi statusnya baru diputuskan tahun lalu 2018. Saya meminta untuk ditinjau ulanglah, karena kalau dari mata saya itu bukanya keputusan RTRW tetapi keputusan pemutihan. Entah jalannya bagaimana karena kami ini kan secara teknis Komisi IV tidak mengetahui secara detail, itu yang saya minta. Kalau perlu ditinjau ulang Dirjen Teknology kemudian Gakun turun lagi kesana, kalau harus direvisi ya direvisi.

Dan saya juga berterima kasih *alhamdulillah* beberapa bulan ini masalah Gajah sudah agak meredah, kalau dulu tahun 2018 mungkin 9-10 masalah Gajah ribut terus, tetapi sekarang *alhamdulillah* sudah agak meredah, Gajahnya sudah tau diri pulang ke habitatnya Bu.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Mungkin sekarang masih musim Duren Pak Sudin, jadi Gajahnya ada makanan disana, nanti musim Duren lewat turun lagi.

Baik saya juga setuju apa yang disampaikan Pak Sudin ini kalau memang ada kesalahan kita juga bisa meanulir tidak masalah, apalagi kalau ada ketemuan indikasi hal-hal yang permainan.

Bu kami persilakan Ibu Menteri, mungkin detailnya pake garis besar dan Ibu janji tadi mau bicara lebih teknis bersama team Ibu kepada tenaga team-team di Komisi IV dalam konteks penyerapan aspirasi sampai ketinggian daerah.

Kami persilakan.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):**

Terima kasih.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR yang kami hormati, Ibu dan Bapak Anggota**

Saya telah mencatat semua yang telah disampaikan dan saya mohon izin tidak menjawab secara keseluruhan tetapi over view nanti jawaban akan kami sampaikan secara tertulis.

Pertama terkait dengan kerusakan lahan dan tipisnya vegetasi dibagian hulu, tadi disampaikan untuk DAS Sadang dan Jawa Barat Citarum, Ciliwung Pak Cucu yang terhormat, kemudian DAS Krowing Aceh. Ini sudah diagendakan untuk tahun 2019 misalnya disadang Jenebrang itu 20 hektar nanti, kemudian Jawa Barat 1.000 lebih kurang, dan Krowing Aceh 10.500 misalnya seperti itu, jadi ini kami rangkum di dalam agenda 2019.

Kemudian terkait dengan pelatihan sosialisasi bencana, sosialisasi lain-lain saya kira kami mendukung dan sepakat saya akan meminta kepada Dirjen PPKL, Dirjen Pencemaran untuk merancang dan mungkin harusnya lebih cepat ya bisa lebih awal lebih baik. Pada dasarnya penguatan sumber daya manusia itu sangat penting dan itu saya kira juga menjadi prioritas dari Bapak Presiden, jadi saya kira kami akan menampung nanti berbagai usulan terkait dengan penyuluhan-penyuluhan sosialisasi dan training-training tingkat tapak. Pada dasarnya langkah-langkah yang ditingkat tapak itu memang yang sedang kami kembangkan juga Ketua, jadi saya kira itu sejalan dengan upaya untuk penguatan ESDM.

Tentang RTWP saya akan dalami lagi dan nanti kita akan melihat prosedurnya itu seperti apa dan kita akan lihat pada bagian mana biar bisa dipercepat, begitu juga usulan-usulan termasuk jalan dan berbagai permasalahan yang ada di daerah. Kalau saya tau datanya secara spesifik wilayahnya dimana, kalau jalan ruasnya yang mana, kalau ada konflik lokasinya dimana, namanya apa saya kira itu dengan cara renpons Kementerian kita akan tangani. Jadi seperti tadi hulu Timur, kemudian jalan di Bone dan sebagainya ini kita akan tangani. Kemudian secara umum terkait dengan persoalan lingkungan apakah itu di pemukiman atau dimana, pada prinsipnya itu di Undang-Undang 32 itu dikatakan bahwa Kementerian LHK itu bisa turun apabila terjadi pencemaran, terjadi kerusakan lingkungan, terdapat keresahan sosial masyarakat. Jadi kalau itu salah satu itu dari tiga ini ada, asal kita tau tempatnya itu kita bisa turun. Jadi

selama ini yang dilakukan oleh para Dirjen, Direktur, dan Kepala UPT adalah hal tersebut.

**Kemudian yang terhormat Pak Cucu,**

Pada dasarnya penurunan fungsi kawasan cagar alam menjadi taman wisata alam, itu pada dasarnya sebagian area kecil biasanya tidak mencakup area secara keseluruhan. Misalnya yang di Kamojang itu luasnya 16.000 hektar yang diturunkan fungsinya itu 100 hektar, karena pada tahun 1974 itu disitu sudah ada gioterma 55 mega wath. Nah buka hanya yang di Kamojang yang seperti ini cagar alam yang menjadi wisata alam biasanya kecil dan biasanya kalau ada masyarakat,

**F-PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.):**

Instruksi Pimpinan, instruksi dulu Pimpinan.

Kalau tadi Ibu Menteri bilang hanya 100 hektar, saya SK tanda tangan Ibu Menteri ini 1000an hektar loh Bu. Coba dicek lagi SKnya yang point memutuskan yang kesatu Ibu yang tanda tangan SK ini perubahan dari cagar alam ke wisata Bandung.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):**

Hem yang saya katakana 100 itu yang dalam arti yang dimanfaatkannya. Yang lain biasanya kondisinya itu hanya untuk kepentingan dia bisa dikelola menjadi taman wisata alam, kemudian kalau dia hanya sebagai cagar alam, kalau dia tidak diturunkan ststatusnya apabila ada masalah dia tidak bisa diperbaiki, tidak bisa di apa-apain karena tidak boleh masuk misalnya seperti itu. Tapi saya akan cek lagi Bapak supaya masyarakat bisa mendapat penjelasan yang pas, karena pada dasarnya kalau secara peraturan tidak masalah, tapi ada persoalan psikologi public, ini kami akan persiapkan secara keseluruhan.

Kemudian yang lain-lain saya kira kaya tanah Toraja dan sebagainya saya berterima kasih tadi ada catatan data, soal konfirmasi kemitraan dan sebagainya, soal batas kawasan dan sebagainya.

Soal plastic, kita sejak 2016 memang sudah melakukan uji coba tentang sampah plastic dan hasilnya sangat bagus. Diretail-retail modern itu plasticnya yang dipakai itu menurun ada yang 30% turunnya, ada yang 60% turunnya di uji coba. Tapi kalau seperti tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Anggota bahwa ketika akan dijadikan

regulasi itu control versinya sangat tinggi, kami mencoba melihat apabila regulasi ini di ejust dulu kepada dukungan untuk gerakan dan dinamika masyarakatnya dari pada soal diblan atau plastiknya ditahan, karena memang kondisi masyarakat kita punya masyarakat dengan pasar tradisional sangat besar jadi tidak mudah. Kami sedang pelajari dan memang sudah dalam tahap-tahap akhir untuk penyelesaian masalah regulasi tentang sampah plastic ini. Tapi sebagai laporan bahwa sudah ada peraturan dari Bapak Presiden untuk penanganan sampah di laut yang sebetulnya adalah sampah plastic karena sampah di laut itu 80% dari darat dan kita sudah rekognisi dari internasional bahwa upaya kita sebetulnya sudah cukup banyak tapi memang tidak cukup pandai menjeleskan. Jadi sekarang kami sedang interaksi dengan You and In Wharment soal persampahan ini untuk kita tangani dan lebih sistimatis lagi dan kelihatan hasilnya.

Jadi saya kira sementara itu Ketua, yang lain-lain yang masih luput nanti kami jawab secara tertulis.

Demikian Ketua, terima kasih.

**F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):**

Iya terima kasih.

**Pimpinan, Anggota, Ibu Menteri dan seluruh jajaran**

Ibu usul saja bahwa pembahasan RUU tanah sangat penting ya buat kami, mungkin perlu menyediakan waktu sangat khusus entah bentuk estibising kah atau seperti apa sehingga kita bisa melakukan pendalaman secara bersama, sehingga kita bisa mengawali dengan baik.

Mungkin itu, terima kasih.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):**

Terima kasih.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI**

Saya mohon izin atas pernyataan yang terhormat Pimpinan Bapak Daniel Johan, bahwa RUU pertanahan ini dibahas oleh Kementerian ATR bersama Komisi II DPR RI.

Muatannya saya lihat isi utamanya saya lihat isi utamanya adalah isi persoalan pendaftaran tanah. Di RUU sudah mendapatkan surprise dan disitu surprisenya adalah Menteri ATR, Menteri Kumham, Mendagri, Menteri PU, dan PUPRA. Jadi tidak termasuk Menteri Kehutanan, tidak termasuk Menteri Energi SDM, tidak termasuk Menteri KKP yang sebetulnya mempunyai urusan di hutan, di wilayah pesisir dan di sumber daya mineral.

Pada rapat terbatas Kabinet kami nanti mohon izin melaporkan dokumen kami yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami menyampaikan keberayan karena di dalam muatan utama dari RUU pada konteks kehutanan adalah meminta pendaftaran hutan kepada PPN di dalam Pasalnya itu disebutkan bahwa, semua tanah termasuk hutan UP, tambang dan lain-lain termasuk wilayah pesisir harus didaftarkan dan ini cros dengan Undang-Undang Kehutanan dan menurut saya sangat prinsip bahkan kami melaporkan bahwa ini tidak sejalan dengan pesan consensus politik Staf MPR nomor 9 tahun 2001 yang memisahkan antara tanah dan sumber daya alam, karena mandatnya berbeda-beda sebetulnya tapi ini seperti dipaksa untuk semua harus ditentukan pendafatarannya menurut peraturan perundangan pendaftaran tanah. Jadi berarti memakai regulasi sebelah sana yang sangat prinsip berbeda dari sumber daya alam dimana engeri sumber daya mineral mempunyai aturan sendiri, wilayah pesisir punya sendiri termasuk kehutanan punya sendiri. Kalau begitu Pimpinan kami akan melaporkan secara tertulis situasi yang kami hadapi untuk Komisi IV DPR RI.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Menteri.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Hem Pimpinan instruksi sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Ibu Menteri mungkin Ibu sudah tau dapat berita belakangan ini di Lampung sedang heboh bahwa hutan logista bisa dibagikan kepada rakyat, disertifikatkan dan

duitnya di kolek oleh Kepala Desa, kalau tidak salah Desanya Sidodadi itu dekat wilayah Jati Agung Bu, bukan yang di Ketibung bukan, kalau Ketibung itu kan ada di Kecamatan Jantung Mintang. Ini yang di dekat Kota Baru Bu itu Kepala Desa mengutip duit miliaran rupiah mengatakan bahwa hutang legister bisa disertifikatkan, termasuk juga ada oknum Pejabat DPD itu sangat boleh, plus juga oknum-oknum di Kabupaten maupun Provinsi mengamini sehingga rakyat dibohongi duitnya sudah diambil dan akan dibuatkan sertifikat sampai hari ini janjinya tidak ada duitnya hilang, sama dengan peralihannya dengan losgita kalau tidak salah 27 ya di Ketibung itu pun demikian Bu. Jadi saya minta untuk ESSLON I atau ESSLON II datang ke lapangan menjelaskan, jangan sampai banyak yang lainnya ketipu. Dan itu sangat yakin Bu, ini nanti karena ada reformasi, ini langsung perintah Presiden bla-bla-bla-bla, narik duit begitu loh. Padahal kalau mereka menanyakan saya, saya jawab itu tidak mungkin bisa. Termasuk juga di wilayah Pringsewu Bu, bahkan ada juga Anggota Dewan yang mengatakan saya lagi berusaha, lagi berusaha untuk membuat sertifikatnya. Saya bilang tidak bisa, karena mohon maaf caleg itu banyak bohongnya Bu. Apa pun bisa sudah kaya Malaikat, oh bisa-bisa sertifikat bisa, orang hutan logista kok dibuat sertifikat. Bangun jembatan bisa, bangun ini jalan bisa, serba bisa. Ini Ibu sudah tau lah berita itulah. Jadi untuk prodatnya Bu, supaya jangan ada korban selanjutnya minta tolong lah, beliau ini ESSLON I agak sibuk, ESSLON II lah minta datang ke Lampung rapat dengan Dinas Kehutanan menjelaskan bahwa hutan logista ini-ini-ini tidak bisa dan tidak mungkin disertifikatkan. Iya Bu ya minta tolong supaya redah Bu.

Terima kasih.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):**

Saya tidak mudah berbicara tentang ini, tapi memang situasi lapangannya kalau menurut saya relative buruk Bapak. Saya minggu lalu dipanggil BPK RI, kami membahas tindak lanjut pemeriksaan BPK ternyata di tanah Perhutani seluas 102 hektar itu terdapat 54 sertifikat Bapak dan saya lihat 1 Kecamatan itu rata-rata 6 sertifikat. Saya memang pernah membaca 1 laporan 2-3 tahun yang lalu bahwa sertifikat tanah di kawasan hutan itu kirra-kira ada 40 ribuan, jadi kalau melihat data BPK yang kemarin dimintakan pada kami itu prokyeksi sekian itu ada. Oleh karena itu, kita memang sudah dibantu difasilitasi oleh KPK untuk permasalahan penanganan tanah-tanah seperti ini sejak tahun 2010-2011. Oleh karena itu keluarlah peraturan tentang penyelesaian penguasaan tanah PPKH dalam kawasan hutan, disitu ada kriteria-kriteria misalnya buktinya sekian puluh tahun dan sebagainya yang oleh kehutanan justru kita sangat hati-hati, karena kalau bicara bukti hukum formal itu orang

selalu menang karena pasti selalu mempunyai cara untuk membuktikan bahwa dia punya. Oleh karena itu memang dari kami sangat hati-hati soal itu.

Kalau boleh Ketua kami mengusulkan kembali, usulan dari yang terhormat Pimpinan Pak Daniel untuk kita mendalami ini supaya bisa terbuka seluas-luasnya dan saya berterima kasih karena saya terbantu jadinya dengan berbagai pemikiran dan juga situasi nyata lapangan yang Bapak Ibu mungkin lebih kaya mempunyai gambarannya. Jadi saya kira mungkin secepatnya atau sebelum reses yang akan datang Ketua.

Terima kasih.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Saat ini jalan tol Bakauni terbanggi agak terhambat, terutama di wilayah Sidomulyo dekat hutan logister. Karena apa, waktu tidak ada pembebasan tol itu tidak ada masalah, tidak ada isu sama sekali. Karena pembebasan jalan itu ganti untung bukan ganti rugi, setelah ada ganti untung ini mulai lah, yang masuk hutan logister saya punya, saya yang menggrap sekian generasi. Tapi begitu ditanya tidak ada sertifikatnya, sementara pihak lain yang tidak menduduki tidak menggarap punya sertifikatnya, ini yang terjadil. Makanya sampai sekarang ada beberapa titik di Sidomulyo data zona itu yang belum bisa dibebaskan oleh team pembebasan daerah.

Ini sekedar info saja, karena kan kasian Bu.

Sementara program Presiden Jokowi membuat jalan tol Bakauni terbanggi, aturanya tanggal 22 Desember diresmikan tapi masih terhambat Bu. Jadi bukan kampanye Ketua bukan, hanya menjelaskan bahwa terjadi masalah-masalah seperti itu.

Tenang saja Ketua, terima kasih.

## KETUA RAPAT:

Engga, yang saya tanggap tadi Pak Sudin mengasih tau ada hari Ibu tanggal 22 Desember.

Baik, saya pikir itu tadi masukan.

Kita langsung kepada kesimpulan, Pak Sudin boleh?

Kesimpulannya ada 4, karena ada permintaanya Pak Rupkono 4.

Pak Robet juga, mana Pak Robet?

*Four point zero industry.*

Baik kesimpulan pertama,

Kesimpulan;

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas realisasi serapan APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 sebesar 7.159.485.302.273 (tujuh triliun seratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua ribu dua ratus tujuh tiga rupiah) atau 88,82% dari pagu sebesar 8.60.951.730.000 (delapan triliun enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Dan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

'Saya pikir ini, Ibu setuju?'

"Setuju Ketua"

'Teman-teman bagaimana keputusan, setuju?'

### (RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan pagu alokasi APBN Kementerian Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 sebesar 9.76.472.682.000 (sembilan triliun tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar APBN tahun 2019, selain untuk pencapaian program nasional juga untuk memprioritaskan program-



program kerakyatan, penegakan hukum Lingkungan Hidup, dan Kehutanan serta mitigasi bencana dan upaya menegak laju pemanasan global.

Bagaimana ini Bu, ada yang perlu perbaikan isinya?

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):**

Izin Ketua,

Bencana dalam upaya itu mungkin dalamnya diganti kata 'dan'.

**KETUA RAPAT:**

Baik ini ada perbaikan, dalam diganti 'dan'.

Teman-teman ada tambahan?

Setuju ya.

Pak Sudin setuju?

Pak Adi setuju?

Pak Robet ini kalau setuju cukup dengan kumisnya yang,

**F-PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.):**

Izin Pimpinan, intruksi dulu.

**KETUA RAPAT:**

Boleh silakan.

**F-PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.):**

Ini hanya mengingatkan saja ya.

Jadi APBN yang diamanatkan Kementerian Kehutanan ini sejumlah segini, apalagi narik kalau kita melihat memprioritaskan program kerakyatan, penegakan hukum Lingkungan Hidup.

Yang pasti saya dari Dapil ini Pak ya. Ibu harus tau juga permasalahan di kami ya, kami ini kawasan industry, diterka lama dengan masalah lingkungan hidup. Jangan sampai Pemerintah juga cuci tangan, berapa ratus ribu kariawan kemarin dengan penegakan Ibu kerja sama dengan TNI yang dilakukan di Majalaya Bu, tapi itu Ibu harus melihat ke lapangan ke bawah. Kalau semua melakukan penegakan hukumnya tanpa melihat way out Bu ya, solusinya Bu ya, ini akan terjadi pengeluaran besar-besaran. Dan ini suara saya dari Dapil, termasuk saya ini jugakan, tapi saya bukan pelaku pencemaran ya karena saya main sudah diterima barang yang sudah warna kalau saya itu, mainnya dari import saya dari China semua.

Bahan baku Pak. Kita dari pada mencemari lingkungan di Majalaya, kita membeli yang jadi saja Pak.

Ini Bu tolong perhatikan ya, saya melihat plate ini bagus tapi, ifal yang diharapkan di Majalaya itu, ya bagaimana cara agar segera terwujud biar tidak terjadi penutupan pabrik yang banyak, bukan sekaligus Ibu gampang saja perintah TNI main tutup pabrik ini.

Ketua saya sampaikan Pak keluhan dari sahabat-sahabat saya ini sangat menderita sekali dan ini verifikasinya ya saya beli benang sekarang jadi mahal Pak, karena ini diterjunksan sama Bu Menteri Lingkungan Hidup, kita juga sepakat Citarum lebih bagus sekarang Citarum marum TNI semua kerja, tapi cari solusi yang bagus Bu ya. Ini Lingkungan Hidup boleh silakan ajukan, misalkan untuk satu Demplot plailot projek terkait ifal dimana, boleh kalau mau memakali APBN yang penting pemanfaatannya bisa dipertanggung jawabkan, kita suprot nanti biar Majalaya nanti ada ifal gabungan. Itu solusi Bu, betul tidak, bukan main tutup dibetot semua orang tidak bisa kerja, nah ini. Ini betul, suara rakyat ini loh Bu yang saya teriakkan disini, karena ini panggunnya dan ini tempatnya saya untuk meneriakkan, ini jangan sampai, kalau dihitung Bu 30 pabrik yang mereka lakukan processing ini tutup semua, cari jalan keluarnya.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Iya ini ibarat dua mata uang, yang satu kalau tidak ada jadi tidak boleh karena dari sisi satu perusahaan nanti baru, tapi sebenarnya dulu kita pernah kunjungan kesana Pak ke, pernah sekali masuk ke itu Pak, Pak Cucun tidak ikut mungkin ya, Pak Mulyadi Sriyadi waktu itu, nah ... juga. Waktu itu yang hadir Ibu Vivin ada tidak ya waktu itu, oh Pak Kali ya datang ya.

Jadi waktu itu kita melihat masyarakat sana menyampaikan 'Pak ini ada ini pengeluaran limbahnya, nanti Pak coba aja Pak pasang cameranya disini malam pasti dia keluarin kesungai'. Bagaimana caranya yang hanya tau orang Kehutanan, orang Lingkungan lah disampang dimana, ini perusahaan kita bikin sampling saja, kalau dia tersangkanya pastikan kucing-kucingan dimana saja ini tidak hanya di Indonesia. Di kampungnya Pak Sudin juga di Wangsu, saran saya nanti kata Pak Cucu nanti bulan 6 aja nanti setelah pilek iya, ini nih kerjaannya kita punya kawan. Pak Cucu pasti kepilih Pak aman.

**F-PD (Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):**

Saya boleh usul untuk point yang kedua Pak Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PD (Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):**

Kita mempunyai 4 mitra, 3 Kementerian dan 1 Perum. Dan jujur kita semua mengetahui bersama, 2 Kementerian baik itu Kementerian Pertanian maupun Kementerian KKP, mulai dari 2015 itu tendensi dari pada pagu semuanya kecenderungannya menurun. Mulai dari Kementerian KKP dari 13 di 2015 sampai dengan 2019 itu 5,4. Sementara Kementerian Pertanian pun itu turun terakhir 2019, 2018 23, 2019 21. Sementara yang didapatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini kecenderungannya naik dan kita lihat angkanya 1 triliun lebih, sehingga bolehkah redaksionalnya apa salahnya kita Komisi IV memberikan apresiasi. Jadi Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan memberikan apresiasi terhadap pagu alokasi APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanann tahun 2019 sebesar koma bla-bla-bla-bla. Karena hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai mitra kerja kita yang mendapat pagu anggaran, sementara yang lain itu terjun bebas, apalagi Kementerian KKP, dari 8 turunnya 5,4.

Itu Pak Ketua usulan kami, terima kasih.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan intruksi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pak Ketua, Pak Michel beda. Kalau KKP dari 13 jadi 5 itu penghematan. Jadi Ibu Susi salah satu Menteri yang paling hebat selndonesia, dikasih 13 triliun, saya tidak mau, saya mau 5 triliun saya, iya itu penghematan. Beda dengan Kehutanan, kalau Kehutanan ini agak selektif mekai uang, kalau itu penghematan. Jadi di media social berkata, Susi lah Menteri yang paling baik, menghemat anggaran APBN.

Itu saja Ketua, temennya Pak Daniel itu.

**KETUA RAPAT:**

Pak Sudin,

Kalau programnya tidak jalan, itu bukan penghematan Pak Sudin. Bukan, itu Pak Sudin sendiran keras itu sebetulnya itu, kira-kira.

Baik tambahan dari Pak Michel menerima penjelasan dan memberikan apresiasi atas pagu alokasi APBN Kementerian Lingkungan. Artinya itu memberikan apresiasi karena atas peningkatan, saya pikir dengan meningkat itu sudah apresiasi, tidak usah disebutkan. Dengan menambah 9 Triliun itu semacam apresiasi, kalau tidak diapresiasi kita taruh diangka 5 lagi misalnya gitu. Engga, kalau saya si dukungnya 25 T, kalau saya. Tapi tidak apa-apa, dari sisi Bahasa masih boleh.

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan memberikan apresiasi atas peningkatan pagu alokasi APBN Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 sebesar 9.76.472.682.000 sembilan triliun tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar APBN tahun 2019 untuk memprioritaskan program-program kerakyatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta mitigasi bencana dan upaya tindak lanjut pemanasan global.

Dan memperbanyak aspirasi di Dapil. Ah tidak boleh dipasang.

Tidak saya kelihatan itu, tidak tau yang lain, belum titik.

Sampai disini, saya ulangi ya.

Nomor 2;

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan memberikan apresiasi atas peningkatan pagu alokasi APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 sebesar 9.76.472.682.000 sembilan triliun tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar APBN tahun 2019 untuk memprioritaskan program-program kerakyatan penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta mitigasi bencana dan upaya tindak lanjut pemanasan global.

Saya pikir ini saklek ya Bu ya.

Oke teman-teman setuju?

Ibu setuju?

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Hidup dan Kehutanan untuk segera menindak lanjuti beberapa usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi RTRW, terutama usulan perubahan kawasan hutan yang berdampak penting dengan cangkupan luas bernilai strategis.

Normative nanti silakan Ibu yang lebih tau.

Teman-teman setuju ini?

Pak Sudin setuju?

Ibu Menteri setuju?

#### **(RAPAT: SETUJU)**

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak lanjutin hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI reses masa Persidangan II tahun Sidang 2018-2019 di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Bali.

Ini normatif dan sebagai hasil kesimpulan dari penjelasan Ibu Menteri tadi dengan usulan kita.

Teman-teman setuju ya?

Ibu Menteri?

**(RAPAT: SETUJU)**

Bapak Ibu sekalian,

Dengan demikian berarkhirlah sudah rapat kerja kita pada hari ini molor dua jam, saya juga lupa memberitahukan ada perpanjangan, mudah-mudahan itu sudah dianggap perpanjangan otomatis.

Bapak Ibu sekalian,

Sebelum kami akhir, kami berikan kesempatan kepada Ibu Menteri untuk memberikan kesempatan untuk memberikan kata penutup.

Kami persilakan.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):**

**Pimpinan yang terhormat,**

**Dan Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.**

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan, arahan catatan yang sangat berkenan untuk secara terus menerus Kementerian LHK dapat menjalankan tugas dan madat perintah-perintah rapat kerja Komisi ini dengan sebaik-baiknya. Sekali terima kasih. Dan kami mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kelemahan.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Kami mewakili Pimpinan dan Anggota teman-teman Komisi IV juga mengucapkan terima kasih atas dedukasi dan semangat kerja Bapak Ibu sekalian yang malam ini hadir lengkap dengan team BRG, Dirut Perhutani dan jajarannya, dan para Dirut PTPN1 dan sampai 5 yang hari ini saya dengar ada yang baru saja dilantik defenitif jadi Direktur Utama dan sebagainya selamat. Saya tidak tau tapi saya mendapatkan berita saja, tinggal memperkenalkan diri nanti Dirut PTPN1, eh Perhutani

itu tadi 1 baru. Kok *insyaallah*, tadikan dilantik. Sudah dilantik saja masih *insyaallah*, tapi *insyaallah* lancar, harus sering bertemu sama Pak Sudin.

Inutani 2 sudah defenitif kan, lengkap dengan POD-nya.  
Kalsel.

Inutani 3 sudah defenitif?  
*Alhamdulillah* selamat.

Inutani 4?

Ini 4 Dapil Pak Sudin Lampung.

Oh maaf-maaf 5 Lampung,  
Beliau Sumbakum, Aceh, Sumut.

Tapi tidak mempunyai lahan di hutan ini mah, hutan imbat tidak mempunyai hutan sendiri.

5 (lima), oh belum hadir.  
Sumatera Selatan, Lampung.  
Paling banyak di Lampung.

Baik selamat buat teman-teman Direksi, itu tadi yang baru saja mendapatkan jabatan defenitif. Kita mudah-mudahan terus bisa berkomunikasi, jangan ragu. Kami Komisi IV ini adalah alat Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan usaha Bapak, termasuk Perhutani yang assetnya paling besar, Pak Dirut saya lihat Bapak punya asset luar biasa besar dan irisan Bapak-Bapak ini semua pasti dengan PTPN 1 sampai 12.

Bukan tidak berani, masih malu-malu Pak Sudin.  
Kalau Pak Sudin, setuju.

Baik Bapak Ibu sekalin, Pak Sudin ada lagi tambahan.

Baik Bapak Ibu sekalian kami sekali lagi menyapaikan apresiasi atas pencapaian kinerjanya semangatnya, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama kita pertemuan. Ini adalah tahun terakhir kami diperiode ini, mudah-mudahan kami masih bisa berlanjut diperiode selanjutnya. Mohon do'anya untuk kita semua semoga ini semua lancar dan dukungannya.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbil'alamin* rapat kerja kami akhir.

*Billahitaufikwalhidayah*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

**(RAPAT DITUTUP)**

Jakarta, 15 Januari 2019

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat,

Ttd.

**Drs. Budi Kuntaryo**

NIP. 196301221991031001